# DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

Ade Maman Suherman.*Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*.Raja Grafindo. Jakarta. Cet 1. 2004.

Adrian Sutedi, *Peradilan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NKRI 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Aminuddin Salle, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Total Media, Makasar, 2007.

Andi Hamza, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

------------*, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi.*Pradnya Paramita,  1985.

-----------. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta .1993.

AP.Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1991.

Arie S.Hutagalung, *Penerapan Lembaga Rechtverweking Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah, Hukum dan Pembangunan Bulan Oktober-Desember, 2000*.

Aslan Noor. *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Jakarta.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia (UI-Press), 1995.

Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia*, Dana Bakthi Prima Yasa, Yogyakarta, 2005

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Diana Halim Kuncoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Djoko Prakoso. Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses idana.Liberty,Yogyakarta 1988.

Edi Rosman, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Komparatif Tentang Hakikat Pidana dan Pemidanaan dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia).*Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Bandung, 2012.

HLM. Irianto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan mahkamah Konstitusi*, PT. Alumni, Bandung, 2008.

*Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan,* LP3ES, Jakarta, 1990.

J.HLM. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Press, Jakarta,, 1988.

J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*. Binacipta,Bandung 1987.

Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Jazim Hamidi dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Juhaya S. Praja. Teori Hukum dan Aplikasinya.Cet 1 Pustaka Setia.Bandung.2011.

Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1994.

Maria SW. Soemardjono, *Hukum Pertanahan Dalam Berbagai Aspek*, Bina Cipta Media, Medan, 2000.

Masdar Farid Mas’udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Pustaka Alvabet, Jakarta, hlm. 2013.

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

Miriam Budiardjo, *Dasar–dasar Ilmu Politik,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1988, hlm. 57

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.

-------------, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta, 1995.

Muchtar Wahid, *Memakai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah,* Republika, Jakarta, 2008.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori -Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, 1984.

Noto Nagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia,* Panjturan, Jakarta.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

S.Chandra, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan*) Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II,* disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955..

Sobirin Malian*, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, 1986.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2002.

Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu),* Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003.

Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Jakarta, 2010.

Syaiful Bakhri, Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2010.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi* *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* 2010

Wirjono Projdodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika. Aditama, Bandung 2003.

Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta 2005.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berikut amandemennya.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Perntahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala Bandan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penangangan Kasus Pertanahan.

**Literatur Lainnya:**

Arie S.Hutagalung, *Kosepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional,* Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Syafruddin Kalo, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-hak Atas Tanah di Indonesia, Suatu Pemikiran,* Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 2 September 2006.